

PEMIKIRAN SULTAN HAMENGGU BUWONO IX TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Ganjar Trisiwi, Subaryana, Mardikun

Abstrak

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan putera dari Sultan Hamengku Buwono VIII yang mewarisi tahta kesembilan di Kasultanan Yogyakarta, dengan sistem pemerintahan yang beliau pegang teguh, yakni Tahta untuk Rakyat. Tahta untuk Rakyat berarti bahwa segala kewenangan dan kekuasaan Raja diabdikan demi keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, serta ketentraman rakyat. Beliau merupakan salah satu tokoh penting saat revolusi pasca kemerdekaan NKRI.

Adanya kesamaan visi antara para founding father dengan Sultan Hamengku Buwono IX telah menghantarkan Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI sebagaimana yang termuat dalam Amanat 5 September 1945. Beliau adalah orang yang meminta agar Ibu Kota NKRI dipindah ke Yogyakarta pasca serangan Belanda ke Indonesia. Selain itu, beliau juga memprakarsai suatu serangan umum untuk melawan bangsa Belanda yang dikoordinasikannya bersama Letkol Suharto dengan tujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa eksistensi kemerdekaan NKRI masih kokoh berdiri. Selain itu, perjuangan juga dilakukan dengan jalur diplomasi. Pada 27 Desember 1949 diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan NKRI di mana Sultan Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai wakil dari pihak Indonesia, karena beliau dianggap sebagai “penjaga gawang” NKRI, yang merupakan benteng pertahanan terakhir dari pihak Indonesia seandainya terjadi kegagalan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Kata kunci: *Pemikiran, Sultan Hamengku Buwono IX, NKRI*

Latar Belakang

Ketika berbicara mengenai revolusi pasca kemerdekaan, salah satu tokoh yang menonjol adalah Sultan Hamengku Buwono IX. Kontribusinya dalam mempertahankan Republik Indonesia (RI) pada awal kemerdekaan sudah tidak dapat diragukan lagi. “... pemegang peran utama dalam sejarah revolusi fisik Indonesia, bahkan arsip intelijen Belanda, NEFIS (*Netherlands Indies Forces Intelligency Service*), menyebutkan, Sultan Hamengku Buwono IX berperan majemuk, horizontal maupun vertikal” (Sumantri, 2012: 174). Beliau ialah seorang Raja yang berkuasa penuh di Kasultanan Yogyakarta dan bertanggung jawab langsung pada Presiden dalam melaksanakan pemerintahannya, namun di samping itu juga sebagai pemimpin dari rakyat Yogyakarta yang sangat beliau ayomi. Dari Sultan Hamengku Buwono IX lahirlah pemikiran-pemikiran yang ideal dan

mumpuni untuk mengawal pemerintahan RI. Berawal dari pernyataan Sultan Hamengku Buwono IX bahwa Yogyakarta siap bergabung dengan RI yang termuat dalam Amanat 5 September 1945 dan disusul Amanat 30 September 1945 yang menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik (Baskoro dan Sunaryo, 2010: 28). Padahal sebenarnya Yogyakarta bisa saja membentuk pemerintahan sendiri mengingat Kasultanan Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan yang sudah memiliki unsur-unsur sebuah negara, yakni rakyat, wilayah, serta pemerintahan.

Penyerangan Belanda atas Indonesia membuat keadaan terutama di Jakarta menjadi sangat tidak aman. Sultan Hamengku Buwono IX memprakarsai pemindahan Ibu Kota RI ke Yogyakarta demi mempertahankan pemerintahan RI. Tepat pada tanggal 4 Januari Yogyakarta resmi menjadi Ibu Kota RI (Yusra, 1995: 153). Tidak hanya sampai di situ, Sultan Hamengku Buwono IX juga menjadi pemrakarsa serangan terhadap Belanda yang lazim disebut dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Secara teknis serangan tersebut diserahkan kepada Letkol Suharto, tetapi tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IX (Suwarno, 2012: 73). Sultan Hamengku Buwono IX berperan di balik layar dengan menyusun siasat untuk melancarkan serangan tersebut. Berdasarkan latarbelakang tersebut kemudian peneliti lebih memfokuskan pada pembahasan tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX untuk NKRI.

Profil Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan gelar yang didapat dari menduduki pimpinan di Kasultanan Yogyakarta yang kesembilan, pada masa kecilnya ia bernama Dorodjatun. Dorodjatun merupakan seorang pribumi dengan garis keturunan bangsawan yang merupakan putera dari Sultan Hamengku Buwono VIII dengan *garwa padmi* (istri permaisuri) yang bernama Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom (Kresna, 2011: 311). Dorodjatun lahir pada hari Jumat Legi pukul 22.30 di Kampung Sompilan, Jalan Ngasem 13 Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta) pada malam Sabtu Paing, tanggal 12 April 1912. Di mana jika dihitung menurut hitungan Jawa hari kelahiran tersebut jatuh pada tanggal 25 Rabiulakhir tahun Jimakir 1842 (Achmad, 2013: 132).

Dorodjatun masuk sekolah untuk pertama kali di *Frobel* (Taman Kanak-kanak) milik Juffrouw Willer yang terletak di Bintaran Kidul. Pada masa ini, untuk pertama kalinya juga Dorodjatun dititipkan pada keluarga Belanda yang bernama Mulder (Suratmin dan Rudianto, 2012: 23). Semenjak saat itu sampai dengan masa Perguruan Tinggi ia selalu dititipkan pada keluarga Belanda.

Setelah memasuki masa Sekolah Menengah Atas (SMA) ayahnya memerintahkan agar melanjutkan studinya di Belanda. Menurut Sultan Hamengku Buwono VIII untuk menghadapi Belanda harus memakai cara-cara yang modern dan sistematis. Cara ini dapat ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan Barat pada waktu itu sudah mengacu pada pendidikan modern, sehingga dirasa menyekolahkan para putra Hamengku Buwono VIII ke Belanda adalah keputusan yang tepat (Dwiyanto, 2009: 445). Namun sayangnya, belum sempat menuntaskan tingkat doktoralnya ia mendadak dipanggil pulang oleh ayahnya yang sudah menderita sakit (Suratmin dan Rudianto, 2012: 33). Suyono *et al.* (2015: 58-59) Ketika Hamengku Buwono VIII beserta rombongan ingin memenuhi undangan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dorodjatun memakai busana keraton gaya mataraman untuk menyesuaikan diri dengan rombongan. Sang ayah secara tiba-tiba menyuruh Dorodjatun mendekat dan membalikkan badan. Tanpa sepele kata Hamengku Buwono VIII menyematkan keris pada punggung Dorodjatun. Keris yang disematkan tersebut ternyata adalah keris pusaka Kyai Jaka Piturun yang merupakan keris turun temurun sebagai simbol penunjukan menjadi Putera Mahkota.

Urusan suksesi kepemimpinan tergantung pada pemerintah Hindia Belanda yang selalu ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak politik. Kontrak politik ini menyangkut jabatan patih (*Pepatih Dalem*), Dewan Penasihat dan Prajurit Keraton. Dorodjatun megaku mendapat *dawuh* (perintah) dari leluhurnya untuk menyetujui kontrak politik tersebut (Yusra, 1995: 75-74). Selang satu minggu setelah naskah perjanjian politik tersebut ditandatangani, kemudian diadakan penobatan Dorodjatun menjadi Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940, dengan gelar *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Abdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullan Kaping IX* (Yusra, 1995: 76). Dengan

demikian resmilah Dorodjatun naik tahta menggantikan sang ayah menjadi Sultan Hamengku Buwono yang kesembilan di Kasultanan Yogyakarta.

Perspektif Sultan Hamengku Buwono IX Terhadap Kemerdekaan NKRI

Setelah melalui perjuangan dan pengorbanan panjang dalam melawan para penjajah, akhirnya tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Berita Proklamasi mulai tersebar ke berbagai daerah di Indonesia melalui siaran radio. Bagi Sultan Hamengku Buwono IX pribadi, proklamasi kemerdekaan sendiri merupakan peristiwa yang membuka jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan batin, sekaligus menempuh jalan bebas guna menentukan sendiri nasib dikemudian hari (Darban *et al.*, 1998: 31-32). Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX di Kasultanan Yogyakarta tidak lantas membuatnya merasa berkuasa sepenuhnya dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang berbasis kerajaan. Jika memang beliau menghendaki, Kasultanan Yogyakarta bisa saja berdiri sendiri mengatur pemerintahan yang sudah terbangun sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Sultan Hamengku Buwono IX memiliki karakter serta sikap politis yang lebih berpihak pada kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi maupun kelompoknya (Achmad, 2016: 254). Beliau ingin menjadi pemimpin yang mendedikasikan kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Kecintaan Sultan Hamengku Buwono IX kepada rakyat ditunjukkannya melalui konsep kepemimpinan “tahta untuk rakyat”. Tahta untuk rakyat berarti segala kewenangan dan kekuasaan Raja semata-mata diabdikan demi keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman rakyat (Achmad, 2016: 255). Sultan Hamengku Buwono IX memimpin untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang beliau ayomi. Bukan untuk mencari kedudukan dalam memerintah. Suatu karakter pribadi seorang pemimpin yang sulit untuk ditemui di masa sekarang. Tujuan lain yang juga ingin dicapai Raja Yogyakarta ini adalah membawa secara langsung dirinya berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan NKRI Pasca Proklamasi

Atas dasar partisipasi serta aspirasi dari rakyat, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan suatu pembicaraan penting kepada beberapa tokoh KNID seperti Paku Alam VIII, Ki Hajar Dewantara dan Purwokusumo, di mana dalam pembicaraan tersebut Sultan Hamengku Buwono IX dapat mengambil kesimpulan bahwa rakyat Yogyakarta begitu antusias dan lega menyambut proklamasi kemerdekaan. Melihat keadaan tersebut beliau bersama-sama dengan Paku Alam VIII atas dasar persetujuan KNID mengeluarkan amanat 5 September 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kedudukan Daerah Istimewa (Darban *et al.*, 1998: 34-35).

Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda dengan melakukan berbagai serangan (Poeponegoro dan Notosusanto, 1993: 122). Kekacauan yang terjadi akibat ulah dari pasukan Belanda yang datang kembali di Indonesia semakin menjadi-jadi. Jakarta yang pada waktu itu menjadi pusat Ibu Kota Negara RI sudah tidak bisa diharapkan lagi dari segi keamanannya. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota ke Yogyakarta. Alasan mengapa akhirnya Yogyakarta resmi dipilih sebagai Ibu Kota RI termuat dalam pidato yang dibacakan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo yang disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta. Dalam pidatonya tersebut ia menjelaskan mengenai alasan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta, yakni yang pertama adalah keadaan yang tidak aman di Jakarta dan yang kedua adalah untuk mempercepat proses penyempurnaan organisasi negara, karena Yogyakarta dinilai mampu memberikan legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan pemerintah RI (Baskoro dan Sunaryo, 2010: 33-34).

Serangan yang dilakukan oleh pihak Belanda semakin menjadi-jadi. Hal tersebut membuat Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya tinggal diam. Pada pertemuan di kompleks Keraton, yang berlangsung sekira tanggal 13 Februari 1949, Sultan Hamengku Buwono IX membicarakan mengenai suatu serangan umum dan

menanyakan kesanggupan Letkol Suharto untuk mempersiapkan serangan tersebut dalam waktu dua minggu. Komandan gerilya itu dengan sigap menyatakan kesanggupannya. Hanya sekali itu saja pertemuan di antara kedua tokoh ini dalam kaitan dengan rencana Serangan Umum 1 Maret 1949. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantara kurir. Melalui kurir pula Hamengku Buwono IX memberitahukan kepada Letkol Suharto pada sore hari 1 Maret bahwa pendudukan Yogya oleh gerilya dinggapnya sudah cukup (Mochtar, 2011: 80).

Hamengku Buwono IX juga menyuruh sekertarisnya Selo Soemardjan untuk menulis surat untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman yang isinya mengharapkan agar tentara melakukan *show of force* tujuannya agar dunia internasional mengetahui kalau Tentara Indonesia masih eksis dan masih terus berjuang melawan agresor (Sumiyati *et al.*, 2001: 57). Belanda merasa terjebak dalam serangan yang begitu mendadak tanpa memiliki persiapan dan hanya dapat bertahan pada markas yang ditempati dan meminta bala bantuan. Meskipun serangan dapat dikatakan berhasil, namun Sultan Hamengku Buwono IX tidak ingin mengambil risiko lebih. Dengan datangnya bala bantuan Belanda ini dikhawatirkan dapat memakan banyak korban dari pihak pasukan Serangan Umum 1 Maret, sehingga semua pasukan harus ditarik mundur saat itu juga.

Pada konferensi di Jakarta yang dimulai tanggal 14 April 1949 antara RI yang diketuai oleh Mohammad Rum dan Belanda yang diketuai oleh Van Rojen yang menghasilkan *Rum-Rojen Statement* yang menyepakati bahwa pemerintah RI menyatakan akan menghentikan perang gerilya dan akan turut serta dalam Konferensi Meja Bundar dan pemerintah Belanda menyetujui Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Dengan demikian, Sultan Hamengku Buwono IX mendapat tugas untuk mempersiapkan Yogyakarta dan diangkat menjadi Menteri Koordinator Keamanan RI pada tanggal 1 Mei 1949 serta diberi tugas untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintah RI di Yogyakarta (Suwarno, 1994: 252).

Selain itu untuk mengantisipasi kegagalan dalam KMB, Hamengku Buwono IX ditetapkan menjadi pemangku jabatan Perdana Menteri yang akan memimpin politik di Jawa serta menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi kaitannya dengan pertahanan NKRI (Nasution, 1979: 353). Pada tanggal 2 November 1949 KMB dengan

resmi berakhir dan tanggal 15 Desember 1949 KNI-P meratifikasi KMB dengan surat 236 dan lawan hanya 62. Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Upacara penyerahan ini dilaksanakan di dua tempat, yakni di Amsterdam dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS yang diwakili Perdana Menteri Moh. Hatta dan di Jakarta kekuasaan Belanda dari AHJ. Lonvink diserahkan kepada Hamengku Buwono IX sebagai wakil dari Indonesia (Darban *et al.*, 1998: 48). Upacara tersebut merupakan langkah akhir dalam Indonesia melawan penjajah Belanda. Dengan ditandatanganinya naskah tersebut, maka bangsa Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.

Simpulan

Sultan Hamengku Buwono IX memiliki nama asli Dorodjatun, beliau merupakan putera dari Sultan Hamengku Buwono VIII dengan istri permaisuri yang bernama Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Semenjak menduduki bangku sekolah, Dorodjatun selalu dititipkan pada keluarga Belanda. Jenjang pendidikannya sudah tinggi, yakni lulusan perguruan tinggi dari negeri Belanda. Setelah pulang ke Indonesia Dorodjatun diberi oleh ayahnya Keris Kyai Jaka Pitirun yang secara turun temurun diberikan kepada pewaris tahta Kasultanan dan kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono IX.

Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Sultan Hamengku Buwono IX sendiri menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pembuka jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan batin, dan juga menempuh jalan bebas guna menentukan sendiri nasib dikemudian hari. Hal ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia keempat. Dari adanya visi tersebut, Sultan Hamengku Buwono IX menginginkan agar Yogyakarta berjuang bagi tegaknya RI. Hal ini termuat dalam amanat 5 September 1945 oleh Sultan Hamengku Buwono IX

yang menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Keinginan Sultan Hamengku Buwono IX untuk berkontribusi secara positif dalam berjuang demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya sebatas ucapan semata, namun juga tindakan nyata. Beliau menyediakan Yogyakarta untuk dijadikan Ibu Kota pasca Jakarta diserang oleh pasukan Belanda. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga mengadakan suatu inisiatif yang dikoordinasikan dengan Letnan Kolonel Suharto dan Panglima Besar Sudirman agar melakukan serangan terhadap Belanda untuk menunjukkan terhadap dunia internasional bahwa Indonesia dengan kekuatan Tentara Nasional Indonesia masih tegak berdiri. Berjuang di jalur diplomasi juga dilakukan. Bangsa Indonesia bersedia untuk melaksanakan KMB dengan mengirimkan beberapa orang perwakilan dan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi pemangku jabatan Perdana Menteri yang akan memimpin politik di Jawa.

Daftar Pustaka

- Achmad, S.W. (2013). *Falsafah Kepemimpinan Jawa Suharto, Sri Sultan HB IX & Jokowi*. Yogyakarta: Araska.
- (2016). *13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Baskoro, H. dan Sunaryo S. (2010). *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darban, A.A. et al. (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*. Jakarta: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
- Dwiyanto, D. (2009). *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme & Teladan Perjuangan*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Kresna, A. (2011). *Sejarah Panjang Mataram Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Diva Press.
- Mochtar, K. (2011). *Pak Sultan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Poeponegoro M.D dan Notosusanto N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution A.H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11*. Bandung: Angkasa.

- Sumantri, B.S. (2012). *Sultan HB IX Pemimpin Revolusi Berperan Majemuk*. Jakarta: Kompas.
- Sumiyati S.E. et al. (2001). *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suratmin dan Rudiantoro D. (2012). *Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pejuang dan Pelestari Budaya*. Malang: Kaiswaran.
- Suwarno, P.J. (2012). *Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949*. Jakarta: Kompas.
- Suyono, S.J. et al. (2015). *Hamengku Buwono IX Pengorbanan Sang Pembela Republik*. Jakarta: KPG.
- Yusra, A. (1995). *Biografi Komat-Kamit Selo Sumardjan*. Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama.